al-Burhan

P-ISSN: 0853-8603, E-ISSN: 2685-0087; 91-106
https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan

PENGALIHAN ISU POLITIK DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-QUR'AN: REKONSTRUKSI ETIKA KOMUNIKASI POLITIK MELALUI ANALISIS BREAKDOWN ZONES DAN VANDALISME VIRTUAL

Political Issue Diversion in the Perspective of Qur'anic Exegesis: Reconstructing Political Communication Ethics through the Analysis of Breakdown Zones and Virtual Vandalism

تحويل القضايا السياسية في منظور التفسير القرآني: إعادة بناء أخلاقيات الاتصال السياسي من خلال تحليل مناطق الانهيار والتخريب الافتراضي

Mohammad Lathiful Wahab
Ma'had Aly Al Hasaniyyah, Senori Tuban Jawa Timur, Indonesia
lathifulwahab7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena pengalihan isu politik (*breakdown zones*) sebagai bentuk vandalisme virtual yang berdampak pada turbulensi sosial dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. Fenomena pengalihan isu melalui media digital tidak hanya membentuk opini publik, tetapi juga menciptakan hiperrealitas yang mengaburkan batas antara fakta dan konstruksi informasi sehingga isu-isu strategis pemerintahan terpinggirkan oleh isu-isu yang bersifat viral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik, literatur ilmu komunikasi, filsafat politik, teori media, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan propaganda, kekuasaan, dan media digital. Analisis data dilakukan melalui teknik content analysis dan metode tafsir tematik (*tafsir maudhû'î*) terhadap QS. Al-Baqarah ayat 42, QS. Al-Fath ayat 18, dan QS. Ar-Ra'd ayat 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengalihan isu merupakan bentuk manipulasi informasi yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan penyampaian kebenaran sebagaimana diajarkan Al-Qur'an. Praktik tersebut melahirkan breakdown zones berupa kemacetan demokrasi, turbulensi sosial, vandalisme virtual, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan media. Oleh karena itu, Al-Qur'an menawarkan prinsip kejujuran, integritas, amanah, dan komitmen terhadap kebenaran sebagai fondasi etika komunikasi politik dalam membangun pemerintahan yang transparan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pengalihan Isu Politik; Breakdown Zones; Vandalisme Virtual; Turbulensi Sosial; Kepercayaan Publik

Abstract

This study aims to examine political issue diversion (breakdown zones) as a form of virtual vandalism that contributes to social turbulence and declining public trust in government from the perspective of Qur'anic exegesis. Political issue diversion through digital media not only shapes public opinion but also creates hyperreality, blurring the distinction between factual information and constructed narratives, thereby shifting public attention away from strategic governmental

issues toward viral but less substantial topics. This research employs a qualitative descriptive approach using library research. Data were collected from Qur'anic verses, classical Qur'anic commentaries, literature on communication studies, political philosophy, media theory, and scholarly publications concerning propaganda, political power, and digital media. Data analysis was conducted through content analysis and thematic Qur'anic interpretation (tafsir maudhu'i), focusing on Qur'an 2:42, 48:18, and 13:20. The findings reveal that political issue diversion constitutes a form of information manipulation that contradicts the Qur'anic principles of honesty, trustworthiness, and truthfulness. Such practices generate breakdown zones characterized by democratic stagnation, social turbulence, virtual vandalism, and declining public trust in both government and mass media. Therefore, the Qur'an offers the values of honesty, integrity, accountability, and commitment to truth as ethical foundations for political communication in promoting transparent and just governance.

Keywords: *Political Issue Diversion; Breakdown Zones; Virtual Vandalism; Social Turbulence; Public Trust*

الملخص

تهدف هذه الدراسة العلمية إلى تحليل ظاهرة تحويل القضايا السياسية بوصفها شكلا من أشكال التخريب الافتراضي الذي يؤدي إلى اضطراب اجتماعي وتراجع الثقة العامة بالحكومة، وذلك من منظور التفسير القرآني. وتنطلق الدراسة من أن تحويل القضايا عبر الوسائط الرقمية لا يقتصر على صناعة الرأي العام، بل يسهم أيضا في إنتاج واقع افتراضي مضلل يطمس الحدود بين الحقيقة والبناء الإعلامي، فينصرف اهتمام الجمهور عن القضايا السياسية الجوهرية إلى قضايا عابرة ذات طابع فيروسي. وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي النوعي من خلال البحث المكتبي، مستندة إلى آيات القرآن الكريم، وكتب التفسير، وأدبيات الاتصال السياسي، ونظريات الإعلام، والفلسفة السياسية، والدراسات المتعلقة بالدعاية والسلطة والفضاء الرقمي. وتستخدم الدراسة تحليل المضمون والتفسير الموضوعي، ولا سيما في قراءة قوله تعالى في سورة البقرة: 42، وسورة الفتح: 18، وسورة الرعد: 20. وتخلص الدراسة إلى أن تحويل القضايا السياسية يمثل تلاعبا بالمعلومات يتعارض مع مبادئ الصدق، والأمانة، والوفاء بالعهد، وإظهار الحق كما يقررها القرآن الكريم. كما تؤكد أن هذه الممارسة تنتج مناطق انهيار تتمثل في تعطّل المسار الديمقراطي، والاضطراب الاجتماعي، والتخريب الافتراضي، وضعف ثقة المجتمع بالحكومة ووسائل الإعلام. وبذلك يقدم القرآن أساسا أخلاقيا لإعادة بناء الاتصال السياسي على الصدق، والنزاهة، والأمانة، والالتزام بالحقيقة.

الكلمات الدالة: تحويل القضايا السياسية؛ مناطق الانهيار؛ التخريب الافتراضي؛ الاضطراب الاجتماعي؛ الثقة العامة.

PENDAHULUAN

Wajah politik bukanlah sesuatu yang asing bagi setiap individu. Dalam istilah Alain Tourain, politik diwujudkan menjadi dua hal, yaitu politik sebagai wujud realitas sosial sehari-hari atau dipresentasikan sebagai *image* media informasi.[1] Dalam kata lain, politik menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengatur sektor pemerintahan Indonesia. Namun, alih-alih politik digardakan sebagai corak pergerakan pemerintahan, senyatanya terdapat berbagai ragam problematika yang muncul. Memasuki era digital, tepatnya pada peradaban 21, manusia senyatanya dihadapkan pada pola-pola media yang kian pelik membingungkan.

[1] Yasraf Amir Pilliang. 2004. Realitas Kebudayaan dalam era Post Metafisika. (Yogyakarta:Jalasutra), 99.

Menurut *we are social* hingga Januari 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai 167 juta atau setara dengan 78%.[2] Termasuk, hadirnya 74 media *mainstream* kian aktif dalam memberikan informasi *framing* politik. Permainan ini dilakukan karena untuk menutup objektifitas informasi, pengalihan isu dan mengedepankan personalisasi institusi. Sehingga, nilai sterilisasi dalam informasi akan hilang dan melahirkan *distrust* yang kemudian publik akan banyak mengkonsumsi berita hoax.[3] Terbukti, banyak masyarakat Indonesia yang mudah percaya dengan isu yang beredar, semacam isu dinasti politik menjelang pilpres 2024. Survei Populi Center melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara random. Kemudian, wawancara dilakukan dengan offline menggunakanW aplikasi populi center. Hasilnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengalihan isu sebanyak 95% dan *margin of error* hanya 2,38%.[4] Kehadiran data demikian, terkategorikan sebagai lika liku kekuasaan politik melalui pengalihan isu atau dalam bahasa singkatnya disebut dengan *breakdown zones*.

Hadirnya *breakdown zones* senyatanya diklaim sebagai salah satu peristiwa "mempertahankan kekuasaan" berbasis pengalihan isu yang menyebabkan turbulensi sosial. Termasuk diantaranya ialah trendingnya kasus Vina yang semakin populer di tengah-tengah naiknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa, rencana kenaikan tarif listrik serta pajak, Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), dan dugaan korupsi 271 Triliun. Mirisnya, kasus ini sudah bukan menjadi persoalan keluarga semata, melainkan sudah menjadi kepentingan publik untuk dimanfaatkan.[5] Belum reda kasus Vina, terdapat kasus lain yang muncul dari seorang penceramah kontroversial dan mengeklaim dirinya sebagai "ahli bahasa suryani". Publik biasa menyebutnya dengan mama Ghufron. Menurut Haikal Hasan, viralnya Mama Ghufron lantaran ada oknum yang sengaja memviralkan untuk menutupi isu politik yang jauh lebih penting, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024.[6]

Menilik hal di atas, terdapat propaganda yang diinisiasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab, dengan memanfaatkan komunikator, komunikan, media dan masyarakat. Dalam analisa penulis, fenomena demikian bukanlah sekedar persoalan, melainkan sudah menjadi aksi vandalisme virtual. Ilusi yang ditampilkan media dinilai sudah menutupi kebenaran, sehingga menimbulkan hiperrealitas guna mengalihkan perhatian publik pada isu yang bersifat semu. Permainan kekuasaan politik dan propaganda yang dihadirkan, tentu akan mengalihkan fokus masyarakat pada isu yang tersebar. Oleh karenanya, makalah ini dihadirkan untuk membahas detail terkait aksi vandalisme virtual yang bukan sekadar mencoret tembok atau merusak fasilitas, melainkan lebih pada merusak citra media dengan pengalihan isu di ruang publik. Kemudian, *breakdown zones* turut ditampilkan untuk melihat kebobrokan media publik berbasis propaganda yang dapat menyebabkan turbulensi sosial hingga ilusi vandalisme. Sehingga, ancaman kekuasaan akan menimbulkan sistem dinasti politik sehingga menghilangkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Indonesia.

---

[2] Muhtar. Ini 7 Media Sosial Paling digunakan di Indonesia. dalam *goodstats.id* (Diakses 29 Juli 2024).

[3] Heri Juanda. 2017. Media Sosial sebagai Penyebarluasan Informasi Pemerintah Aceh. Dalam *Jurnal Peurawi Media Kajian Komunikasi Islam* Vol 1, No 2, 3.

[4] CNN Indonesia. Ragam Hasil Survei Sikap Publik atas Isu Politik Dinasti. Dalam *CNN Indonesia.com.* (Diakses 24 Agustus 2024).

[5] Mayong Tetra Aminuddin. 2017. Kreativitas Bimbingan Media dan Konseling untuk Mengatasi Perilaku Vandalisme. Dalam *Jurnal Prosiding SNBK* Vol 1 No 1, 203.

[6] Mayong Tetra Aminuddin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai fenomena pengalihan isu politik (*breakdown zones*) sebagai bentuk vandalisme virtual melalui perspektif tafsir Al-Qur'an yang dipadukan dengan teori komunikasi politik, filsafat media, dan teori kekuasaan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip kejujuran, amanah, komitmen, dan larangan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 42, QS. Al-Fath ayat 18, dan QS. Ar-Ra'd ayat 20 beserta kitab-kitab tafsir, antara lain *Tafsir al-Baidhawi*, *Hasyiyah al-Shawi*, *Al-Qur'an Andalusia*, dan *Tafsir al-Qur'an Perkata*. Data sekunder diperoleh dari buku-buku komunikasi politik, filsafat sosial, teori media, karya Jean Baudrillard, Yasraf Amir Piliang, Alain Touraine, Michel Serres, Antonio Gramsci, Steven Lukes, serta artikel-artikel ilmiah dan laporan resmi yang membahas propaganda politik, media digital, dan kepercayaan publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah literatur yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi konsep-konsep pokok mengenai vandalisme virtual, propaganda media, *breakdown zones*, turbulensi sosial, dan kepercayaan publik. Selanjutnya dilakukan analisis tafsir tematik (*tafsir maudhû'î*) dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan etika komunikasi, amanah kepemimpinan, serta penyampaian kebenaran, kemudian mengaitkannya dengan teori komunikasi politik dan fenomena media digital kontemporer.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan penafsiran ulama klasik, teori sosial modern, hasil penelitian terdahulu, serta data empiris mengenai fenomena pengalihan isu politik di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai etika komunikasi politik menurut Al-Qur'an dalam menghadapi praktik pengalihan isu di ruang digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Vandalisme Virtual: Pengalihan Isu Media Publik

Vandalisme merupakan aksi yang merusak tatanan sosial di lingkungan masyarakat. Menurut Obiagwu, Vandalisme diartikan sebagai tindakan mencoret, merusak, membakar fasilitas umum dan memberikan virus baru pada komputer dengan bertujuan sebagai bentuk protes atau kekesalan pada pihak tertentu. Dalam definisi lain menurut Ali Maksum, vandalisme dimaknai dengan tindakan meyimpang dan tidak sesuai dengan norma sosial. Ketika pelaku vandalisme mencoba untuk mengungkapkan ekspresi dengan norma-norma yang berseberangan di tengah-tengah masyarakat, suku, budaya, dan ras, maka hal tersebut dikatakan dengan aksi vandalisme.[7]

Jauh sebelum muncul definisi di atas, sebuah catatan sejarah yang dilansir dari *Qatar Technology* menuliskan, kemunculan nama vandalisme berasal dari suku bangsa

[7] Mayong Tetra Aminuddin dan Uswatun Hasanah. 2017. Kreatifitas Media Bimbingan dan Konseling untuk Mengatasi Perilaku Vandalisme. Dalam *Jurnal Prosiding SNBK* Vol 1 No 2, 223.

Jerman kuno yang dikenal dengan "Vandal". Tepat pada abad ke-5 suku Vandal menyergap dan menyerang suatu suku di Afrika utara. Sehingga, dengan hadirnya penyerangan tersebut, suku Vandal mulai trending di kalangan eropa sebagai aksi kekejaman dan tindak kerusakan.[8] Kemudian, memasuki abad ke-18, istilah "vandalisme" mulai digunakan dalam bahasa inggris dengan dalih sebagai tindakan kerusakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu dan menyalahi aturan norma atau etika. Sehingga, aksi yang menyalahi aturan norma ini, mulai masuk daerah perkotaan dengan ekspresi mencoret dinding dan merusak fasilitas umum.[9]

Maraknya aksi vandalisme, tidak lepas dari dua faktor, yaitu eksistensi serta pencarian jati diri dan situasi serta kondisi politik. Menyikapi situasi dinamika politik di Indonesia, maka sangatlah kompleks dan membingungkan. Bagaimana tidak, negara yang berdiri di atas banyak etnis, bahasa, suku, agama dan budaya, senyatanya turut menerjang berbagai ragam politik. Sehingga, kekacauan politik tak terhindarkan, seperti polarisasi politik yang meningkat, banyaknya perubahan kebijakan yang mendadak, goyahnya koalisi pemerintahan, trendingya isu korupsi dan tidak meratanya keadilan. Dengan demikian, akan banyak para pendukung partai yang saling hantam dan mengakibatkan aksi vandalisme. Kedengkian dan saling membenci akan mengakibatkan propaganda sampai unjuk rasa atau protes pada pemerintah setempat.[10] Seperti aksi vandalisme di kota Solo yang bertuliskan "negaraku minus nurani" dan "orang miskin dilarang sakit" sebagai bentuk protes terhadap Gibran Rakabuming Raka atas Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 Tahun 2021.[11]

Namun, seiring berkembangnya zaman, aksi vandalisme tidak hanya digariskan sebagai tindakan mencoret tembok, merusak fasilitas umum atau membakar ban di atas jalan raya saja, melainkan makna vandalisme senyatanya diartikan lebih luas. Meminjam istilah Jean Badruliiard, memaknai Vandalisme hanya sekadar pandangan realitas di dunia nyata, maka hal tersebut tidak berkembang. Maknanya, wujud vandalisme era kini, telah mematikan wujud sosial di dunia maya atau bisa dikenal dengan vandalisme virtual. Memasuki lorong sosial pada ruang pososial, manusia sudah dihadapkan pada media virtual yang menggiring ke arah matinya sosial *(the death of social)*. Berbagai ragam media informasi, mulai dari televisi, koran digital, internet dan berbagai macam alat digital, senyatanya telah mengubur realitas sosial hingga terjebak dalam simulakrum sosial. Yakni, duplikasi sosial dari dunia nyata ke maya, akan tetapi wujudnya sudah dianggap terdistorsi, menyimpang dan memanipulasi realitas sosial. Sehingga, citra media virtual, akan semakin membingungkan karena fantasi, ilusi, realita susah untuk dibedakan. Kerusakan dan penggiringan opini publik akan terus berlanjut hingga fakta yang seharusnya tersampaikan senyatanya tidak bisa dibahas.[12]

Maknanya, citra media yang kredibelitasnya sudah terpercaya, akan dinilai rapuh karena tidak adanya kemampuan menyampaikan berita sesuai realita. Dalam hal ini,

---

[8] L.A. Ajoa. 2018. *An-Anti Theft Oil Pipeline Vandalism Detection: Embedded Sytem Development*. Dalam *International Journal of Engineering Science and Application* Vol 2 No 2, 42.

[9] Ilham Fikriansyah. Mengenal vandalisme Adalah: Sejarah, Penyebab dan Contohnya. Detikbali.com (Diakses 26 Juli 2024).

[10] Santana Suprapringgana dan Tajul Arifin. 2024. Vandalisme Menurut Persfektif Islam dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Dalam *Jurnal Pendidikan dan Insan Humaniora* Vol 2 No 3, 232.

[11] Ronald Seger Prabowo. Bersihkan Vandalisme Kritikan Pemerintah di Solo, Gibran: Yang Buat Silahkan Ketemu Saya. Dalam *suarasurakarya.id* (Diakses 29 Juli 2024).

[12] Yasraf Amir Pilliang. 2004. Realitas Kebudayaan dalam era Post Metafisika. (Yogyakarta:Jalasutra), 99.

lebih ditekankan pada pembawaan berita yang mengalihkan isu untuk menutupi kebobrokan dan tindakan yang seharusnya mendapat sorotan lebih. Termasuk diantaranya ialah keputusan terkait perubahan peraturan TAPERA Nomor 21 Tahun 2024 pada tanggal 20 Mei 2024 dengan ketentuan program TAPERA tidak hanya menyasar Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan diperluas terhadap pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sampai pekerja mandiri. Adapun nominal potongan tersebut ialah sebesar 2,5% sampai 3% yang nantinya akan dikelola oleh pihak Badan Pengelola TAPERA (BP TAPERA).[13]

Bukan hanya persoalan TAPERA, namun permasalahan tentang kasus korupsi 271 Triliun turut tenggelam. Dalam catatan kejaksaan agung Jakarta selatan, kasus korupsi timah dengan nominal 271 Triliun senyatanya sudah ditetapkan pada tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim. Berbagai barang bukti, mulai dari 8 unit mobil mewah, 22 tas mahal, 11 bidang tanah, 141 perhiasan, logam dan USD 400.000 dan Rp 13.581.013.347 dolar Amerika Serikat (AS) sudah diamankan pihak kepolisian.[14] Akan tetapi kasus di atas lambat laun terbenam karena adanya isu yang mencoba menutupi kasus tersebut. Hal ini dibuktikan dengan semakin trendingnya kasus mama Ghufron yang memperkenalkan dirinya sebagai "ahli bahasa suryani".

Sebagai seorang pengasuh Pesantren UNIQ malang, tentu dia juga turut menyampaikan dakwahnya, namun bersifat sesat. Mama Ghufron atau Iyus Sugirman, dianggap sesat oleh kalangan Nahdhliyyin karena dakwahnya yang menuai kontroversial. Termasuk diantaranya ialah ceramahnya ngawur, penempatan bahasa suryani yang salah, akidah yang melenceng dan sebagainya.[15] Oleh karenanya, momen trendingnya mama Ghufron senyatanya menutupi kasus-kasus kenegaraan yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik. Sehingga masyarakat netizen secara bertahap melupakan isu negara dan lebih fokus pada isu yang sifatnya belum penting. Menurut CNN Indonesia, Masyarakat Indonesia mudah terbawa dengan adanya isu yang trending Survei Populi Center melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara random. Kemudian, wawancara dilakukan dengan offline menggunakan aplikasi populi center. Hasilnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengalihan isu sebanyak 95% dan *margin of error* hanya 2,38%.[16]

Detailnya, citra yang dibangun oknum-oknum tertentu untuk menutupi kasus perpolitikan di Indonesia, senyatanya berjalan dengan baik. Mengingat, platform media sosial adalah ruang terbaik untuk dijadikan tempat pengalihan isu dan membangun citra.[17] Dalam jurnal komunikasi dan pembangunan (KOPUM), media diartikan sebagai institusi yang membentuk opini publik, baik media cetak maupun online. Maknanya, citra bisa dihadirkan dalam pemberitaan. Citra ini, kemudian akan membentuk opini yang seakan-akan realitas serta disampaikan melalui media dan kemudian akan

[13] Ayudiana, Shofi. "Tapera, Antara Niat Baik dan Beban". Dalam *antaranews.com* (Diakses 21 Juli 2024).

[14] Adli Al Hasan. Tekor Negara 271 Triliun Akibat Korupsi Timah, Berikut Rincian Kerugian Negara, Linkungan, hingga Ekonomi. Dalam *tempo.com* (Diakses 29 Juli 2024).

[15] Arief Setyayadi. 5 Fakta Mama Ghufron Soal Bahasa Suryani yang Viral. Dalam *nasional.okezone.com* (Dikases 29 Juli 2024).

[16] CNN Indonesia. Ragam Hasil Survei Sikap Publik atas Isu Politik Dinasti. Dalam *CNN Indonesia.com.* (Diakses 24 Agustus 2024).

[17] Sulisalawaty. 2014. Melihat ke Belakang: Panggung Gemoy dan Dinamika Politik Masa Kini. Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Politik dan Humaniora Vol 3 No 2, 165.

dikonsumsi publik atau bisa disebut dengan *second hand realiti*. Adapun percobaan membentuk opini menjadi realitas untuk disampaikan maka disebut *gatekeeping*.

Hemat kata, keberadaan berita yang disampaikan media, sangat berpengaruh terhadap kemunculan kabar yang diberikan. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo senyatanya mengungkapkan fakta, bahwa terdapat beberapa media yang dinilai pro pemerintah. Dalam sambutan yang diberikan, beliau mengatakan: *"Sejak saya memimpin negeri ini, terdapat 334 media baik online maupun cetak yang pro pemerintah. Berbagai ragam aktivitas mulai dari rapat, aktivitas, langkah-langkah pemerintah dan khususnya di lingkungan lembaga ataupun kementerian mereka potret".* Bukan hanya demikian, dalam penuturannya turut disinggung, bahwa adanya media online, masa, cetak atau elektronik dinilai sangat berpengaruh terhadap pembentukan image pemerintah.[18] Hal ini dibuktikan dengan media raksasa yang menjadi pendukung barisan Jokowi Dodo yaitu media Metro.TV milik surya Paloh, MNC Group milik Hary Tanoesoedibjo, Jak TV, Alif TV, Gen FM, Kis FM, Republika Online, dan Sportku.Com milik Erick Thohir.[19] Mendetailkan hal demikian, senyatanya al-Qur'an telah mengkaji tentang ayat tidak diperbolehkannya mencampuradukkan antara sebuah fakta dengan isu pembodohan guna menutupi kebenaran. Allah mengatakan dalam firma QA. al-Baqarah/2: 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ (البقرة/2: 42)

Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan21) dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya) (Al-Baqarah/2:42).

Mendetailkan ayat di atas, maka dalam *tafsir al-sawy* telah dijelaskan bahwasanya dilarang bagi manusia untuk mencampuradukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Maknanya, kebenaran yang telah diturunkan Allah kepada manusia harus dijaga dengan baik dan tidak boleh diracik dengan hal-hal negatif.[20] Kemudian, Abu Said al Baidhowy dalam *tafsir al-baidhowy* menuturkan, maksud dari kata "menyampur" ialah menjadikan suatu hal dengan disamakan pada perkara lain. Tatkala perkara tersebut dicampur dengan perkara lain, maka bisa dipastikan tidak akan bisa dibedakan.[21] Tentu, kemudaratan akan timbul dan kemaslahatan akan hilang. Padahal, Menurut syaikh Ramdan al-Buthi, membawa kemaslahatan dan menolak kemudaratan, merupakan bagian dari menarik sebuah kemanfaatan.[22]

Breakdown Zones: Turbulensi Sosial hingga Ilusi Vandalisme

Giat politik kian memanas di era modern dengan hadirnya kasus-kasus yang mengalihkan isu pemerintahan ke isu yang bersifat tidak penting untuk dibahas.

[18]Novy Lumanau. "Presiden Akui Adanya Media yang Pro dan Kontra Terhadap Pemerintah". *Beritasatu.com* (26 Juli 2024).

[19] Amirullah. Tiga Pemilik Media massa di Barisan Pendukung Jokowi. *Tempo.com* (Diakses 26 Juli 2024).

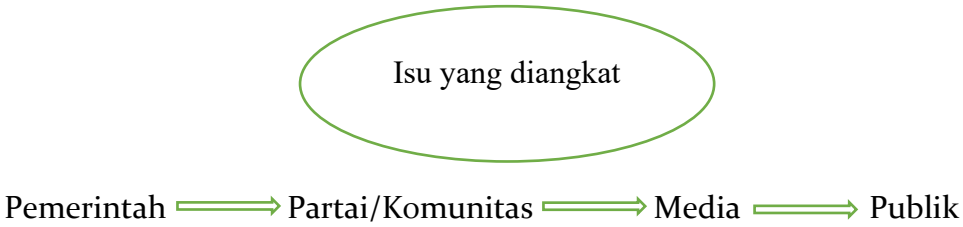
[20] Imam Ahamad bin Muhammad Al-Shawy. *tt*. *Hasyiyah al-Shawy* Juz 1 *(tt:* Haromain), 47.

[21] Imam Nashiruddin Abi Said Abdillah Bin Umar Al-Baidhowy. 2019. *Tafsir al-Baidhowy* Juz 1 (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiah), 117.

[22] Syaikh Muhammad Said Romdon al-Buthi. *tt. Dhowabith al-Maslahat Fi Syariatil Islamiyyah.* (Kairo: Al-Azhar), 23.

Maknanya, dengan kehadiran isu tersebut, akan memunculkan zona-zona kemacetan yang bisa menjadikan ruang politik tidak sehat, tidak demokrasi, merusak citra media di mata publik atau disebut *breakdown zones*. Keberlangsungan kebuntuan dalam sistem politik senyatanya dinilai merusak pola-pola kenegaraan yang mengadopsi demokrasi sebagai ajang kampanye politik di Indonesia. Meninjau lebih detail, zona kemacetan yang terjadi dikarenakan adanya kecurangan politik oleh oknum tertentu yang memanfaatkan media untuk menghancurkan demokrasi di Indonesia. Tentang kemacetan inilah, muncul istilah propaganda sebagai potret kebohongan informasi publik yang secara kontesktual, berarti sejumlah pesan yang dirangkai sebaik mungkin untuk mempengaruhi masyarakat, pendapat dan organisasi.[23]

Dengan demikian, Paul Joseph Goebbels menegaskan: *"The Essense of propaganda consists in winning people over to an idea so sincerely, so vitally, that in the end they succumb to it utterly and can never escape from it"*. Menyebarkan kebohongan berulang kali pada publik, akan menjadikan publik percaya. Mengurai analisa Goebbels, kebohongan terbesar ialah mengubah kebenaran meskipun sedikit, karena sifatnya telah berkembang dalam psikologis hingga menemukan eksistensinya.[24] Senafas dengan hal tersebut, maka propaganda dalam politik turut hadir dan melibatkan pemerintah, partai, komunitas tertentu, media dan publik untuk mencapai tujuan taktis serta strategis.



Detailnya, tatkala dikaji lebih lanjut menurut sudut pandang Alain Touraine, maka bisa dipastikan banyak sistem yang tidak sehat. Hematnya, tingkat citra dalam menutupi realitas politik di Indonesia dinilai sangat tinggi. Tercatat, pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2020 lalu, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, laporan masyarakat terkait politik uang pada pilkada 2020 sangat tinggi. Sebanyak 262 kasus masuk pengkajian serta penyidikan, 197 laporan masyarakat, dan 65 kasus temuan bawaslu[25]. Bukan hanya demikian, kasus lain turut hadir dengan bentuk politik identitas. Menjelang Pemilihan Presiden (pilpres) 2024, postur calon presiden Ganjar Pranowo muncul di tayangan video azan Maghrib salah satu siaran MNC Group. Sehingga, hal ini menimbulkan kegaduhan di media sosial sebagai fenomena citra diri politik identitas yang sebelumnya tiada riwayat muncul sebagai model video azan.[26]

---

[23] Andi Touna Bachtiar dkk. 2016. Peran Media dalam Propaganda. Dalam *Jurnal Komunikologi* Vol 13 No 2, 79.

[24] David R Wilcox. 2005. *The Theory of Propaganda, In Propaganda, The Press and confilct* (sage Publications: London), 205.

[25] Robi Ardianto. Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus politik uang, 197 dari Masyarakat. Dalam *Bawaslu.go.id* (Diakses 27 Juli 2024).

[26] Baiq Marcelina Geovani Hazri, Adelina Putri Yasmin, Dwiki Elyran Adha, dan Erwan Efendi. 2024. New Media: analisis Kritik Netizen terhadap kampanye Politik Identitas Ganjar Pranowo Melalui Azan Stasiun TV pada Media Sosial Tiktok. Dalam *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 4 No 3, 1490.

Maknanya, dengan hadirnya pengalihan isu, problematika semacam *money politic* dan politik identitas akan tertutupi karena masyarakat akan fokus pada isu yang buming. Dalam ungkapan Touraine bisa dikatakan matinya sosial dan demokrasi atau disebut posdemokrasi. Posdemokrasi sendiri, akan tetap berlangsung tatkala kekuatan pengendalian (*goverment*) dan pengaturan (*management*) tidak berjalan. Dengan demikian, ketidakberaturan dan keacakan disistem akan terguncang (*randomness*). Terlebih, ketidakpastian akan semakin mewarnai kehidupan berbangsa hingga menyebabkan turbulensi sosial.[27]

Secara terminologi, turbulensi sosial diartikan dengan sebuah keadaan tidak stabil (*disorder*) dan keacakan (*randomness*) pergerakan sosial di setiap zona. Turbulensi menarik komponen sosial, mulai dari mahasiswa, siswa, konstituen politik untuk dipengaruhi pada aspek tertentu untuk menimbulkan guncangan sosial. Hakikatnya, turbulensi merupakan penting dalam dinamika demokrasi.[28] Namun, tatkala turbulensi tidak mampu dikendalikan, maka akan masuk pada ranah posdemokrasi. Menurut Michel Serres dalam Genesis, Turbulensi diartikan sebuah keadaan tapal batas antara normal dan kacau, kepastian dan ketidakpastian, diamalkan dan tidak teramalkan. Sebagaimana ungkapan Serres, turbulensi adalah: "*Keadaan antara, dan juga campuran agregat. Seandainya kita membedakan antara keadaan ketidakberaturan dengan keadaan beraturan, turbulensi adalah tengah-tengah diantara kedua keadaan ini, ia adalah keadaan yang susah digambarkan, susah dikaji secara akademik, akan tetapi bersamaan dengan demikian merupakan keadaan umum, sangat indah, lengkap, universal yang di dalamnya terdapat keberaturan, sebuah keberaturan yang belum matang atau sudah tahap akhir, yang di dalamnya tidakberaturan dan chaos juga ditemukan".*[29]

Pemaknaan yang disampaikan, bisa ditarik senafas bahwasanya kekacauan yang terjadi dalam politik hari ini akan menciptakan keadaan yang tidak seimbang dan mudah untuk terjerumus pada pengiringan opini dan pengalihan isu. Sehingga banyak kalangan masyarakat akan termakan berita bohong (*hoaks*) yang mencoba menenggelamkan isu penting ke arah isu yang seharusnya sudah bisa diselesaikan. Media sosial yang seharusnya menjadi tempat informasi berubah menjadi turbulensi sosial hingga ilusi vandalisme. Sebagaimana yang telah dipaparkan di muka, vandalisme kini masuk ke ranah media dengan merusak citra media yang banyak diisi isu-isu yang justru tidak memberikan manfaat terhadap masyarakat.

Oleh karenanya, pemaknaan ilusi yang dimaksud digambarkan seperti halnya keadaan fakta yang tertutup dengan opini kebohongan. Banyak media -termasuk media pro pemerintah- lebih merespons isu di luar aktivitas pemerintahan, utamanya menjelang pilkada saat ini. Contohnya media TVOnenews.com yang secara berkelanjutan terus membahas kasus Mama Ghufron yang mampu bicara dengan semut, berkomunikasi dengan malaikat maut dan parahnya, menjadikan kasus Mama Ghufron ini menjadi topik utama kajian di media tersebut.[30]

---

[27] Yasraf Amir Pilliang. 2004. Realitas Kebudayaan dalam era Post Metafisika. (Yogyakarta:Jalasutra), 254.

[28] Yasraf Amir Pilliang

[29] Yasraf Amir Pilliang. 2004. Realitas Kebudayaan dalam era Post Metafisika. (Yogyakarta:Jalasutra), 257.

[30] Kevi Laras Wana. Mama Ghufron merasa ngak Takut kalau dilaporkan dan dianggap Menyesatkan, MUI akan Duduk Bersama untuk. Dalam *tvonenews.com* (Diakses 29 Juli 2024).

Padahal, tatkala dilihat dengan saksama, kasus Mama Ghufron senyatanya sudah sangat jelas menentang konsep ajaran Islam dan butuh untuk ditindak secara langsung dan kenapa harus berlarut-larut dibiarkan hingga dibiarkan berkelanjutan sampai kini terupload di media sosial? Seharusnya, Majlis Ulama Indonesia (MUI) segera memberikan tindakan kasus tersebut agar tidak berlarut-larut hingga kini. Walaupun, ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah M Cholil Nafis sudah memberikan tanggapan, namun beliau masih menggantungkan kasus ini melalui media untuk melihat perkembangannya bukan mengajak diskusi secara terbuka guna mengetahui kebenaran dan segera terselesaikan.[31]

Lebih lanjut, hadirnya problematika demikian, senyatanya diniscayakan sebagai sebuah "ilusi" untuk menutupi sistem perpolitikan negara dan berbagai isunya. Sehingga, titik fokus masyarakat bukan lagi terarah untuk turut merespons dan memberikan kritik terkait kenegaraan melainkan terarah pada isu trending yang viral. Inilah yang dinamakan sebagai ilusi vandalisme, yaitu kebobrokan oknum media dalam mengupdate berita sehingga menyebabkan isu politik kenegaraan terduakan dan permainan kekuasaan dalam politik terlupakan. Kritik dan saran yang seharusnya membanjiri pemerintah akan tiada dan oknum-oknum dalam pemerintahan akan mudah untuk melakukan aksi vandalis yang tidak sesuai dengan aturan politik di Indonesia. menilik hal ini, sangat penting bagi pemerintah sendiri untuk menjaga kesetiaan dengan tidak membuat ilusi berupa pengalihan isu yang ditugaskan pada oknum tertentu guna menutupi kebenaran yang terjadi. Sebagaimana telah Allah firmankan dalam QS. al-Fath:48 yang berbunyi:

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًاۙ ﴿١٨﴾ (الفتح/48: 18)

Sungguh, Allah benar-benar telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad) di bawah sebuah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan berupa kemenangan yang dekat (QS. Al-Fath/48: 18).

Dalam penuturan ayat di atas menjelaskan, Rasulullah melakukan perjanjian Hudaibiyah tepat pada bulan Dzulhijjah. Adapun tempat perjanjian tersebut dilakukan di bawah pohon Samurah Hudaibiyyah, yang dimaksudkan supaya orang-orang mukmin setia terhadap nabi dan tidak berlari ketika peperangan terlaksana. Makna dari isi hati adalah adanya sifat kejujuran dan kesetiaan yang harus dimiliki dalam perjanjian ini.[32]Detailnya, ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menyetujui serta meridhoi atas Nabi dan sahabatnya untuk membuat perjanjian dengan musuh-musuhnya.[33]Dalam konteks politik, menjaga kesetiaan atau janji adalah bentuk komitmen seorang pemimpin. Termasuk diantaranya ialah tidak membuat kegaduhan sosial dengan menutupi berita fakta yang seharusnya diketahui masyarakat dengan opini bohong.

[31] Junaidi. Respons Polemik Mama Ghufron: MUI Lakukan Kajian, Termasuk Video Call dengan Malaikat maut. Dalam *mui.or.id* (Diakses 29 Juli 2024).

[32] Abdul Kholiq Hasan. 2013. Al-Qur'an Andalusia (Tiga Serangkai: Solo), 1024.

[33] Imam Nashiruddin Abi Said Abdillah Bin Umar Al-Baidhowy. 2019. *Tafsir al-Baidhowy* Juz 3 (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiah), 117.

Dinasti Politik dan Hilangnya Kepercayaan Publik

Munculnya kata "dinasti politik" senyatanya dimulai pada saat pelaksanaan pilpres 2024. Konsep politik yang seharusnya menggunakan sistem presidensial, kemudian kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan, dengan catatan, presiden menjadi kepala negara dan pemerintahan, maka hal tersebut mulai tergusur dengan adanya dinasti politik. Wacana adanya dinasti politik di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan kekuasaan perpolitikan hanya dikuasai oleh mayoritas keluarga tertentu.[34]Namun, persoalan lain turut hadir dengan konsep yang berbeda. Tatkala dinasti politik pernah diisukan sebagai persoalan politik yang dikuasai sekelompok keluarga, maka dinasti politik kali ini dikuasai oleh oknum yang berkuasa di pemerintahan. Detailnya, berbagai ragam kecurangan politik melalui media sosial dengan memunculkan isu baru guna menutupi kebenaran sudah tidak menjadi bumerang lagi.

Oleh karenanya, kekuasaan politik ini dinilai lebih ganas daripada kekuasaan politik yang hanya dimainkan oleh sekelompok keluarga tertentu. Bagaimana tidak, kasus atau isu pemerintahan semacam korupsi 271 T, TAPERA, kenaikan UKT, dan kecurangan PILKADA 2024 -termasuk *money politic* dan politik identitas- akan tenggelam. Maknanya, lambat laun, respons masyarakat akan terus berkurang karena media sosial dipenuhi dengan viralnya isu yang tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut hingga oknum pemerintahan dengan mudah melancarkan aksi kecurangan perpolitikan. Menilik teori kekuasaan yang kemukakan oleh Steven Lukes dalam karyanya *Power: A Radical View* (1974), dalam catatannya, banyak kritik yang diberikan kepada ahli teori kekuasaan, termasuk teori Robert Dahl tentang konsepsi kuasa kaum *Behavouralist*. Roberh Dahl mendefinisikan bahwa kekuasaan ialah power yang dimiliki seseorang untuk memerintahkan terhadap orang lain, walaupun orang tersebut enggan mengerjakan.[35]

Tentu, jika oknum pemerintah yang mempunyai kuasa dalam sistem pemerintahan, kemudian memanfaatkan media sebagai jalan untuk melancarkan pengalihan isu dalam menutupi kasus yang terjadi, maka hal ini senafas dengan ungkapan Roberh Dahl. Sebagaimana teori Hegemoni Antonio Gramsci yang berkaitan dengan kekuasaan dan politik kenegaraan. Ketika teori ini dimaksudkan untuk hal positif, semisal presiden mempunyai hak penuh untuk membangun kerjasama dengan negara lain, maka akan banyak membawa dampak positif pada sosial-ekonomi masyarakat. Namun, ketika dimaksudkan dalam hal negatif, seperti kekuasaan dijadikan alat untuk menutupi kebobrokan pemerintah dengan cara mengalihkan isu kenegaraan pada isu yang seharusnya bisa cepat diselesaikan, maka akan membawa dampak negatif bagi citra pemerintah sendiri.[36] Dalam bahasa lain, bisa dikatakan sebagai "kekuasaan lunak" dengan memakai pendekatan struktural ideologi terhadap masyarakat untuk turut merespons polemik yang viral.[37]Sehingga ungkapan dinasti

[34] Ilham Budiman Panggabean dan Aprilinda Martinondang Harahap. 2024. Persfektif Islam tentang Dinasti Politik. Dalam Jurnal Ilmu Agama Vol 7 No 2, 2.

[35] Danial Hutagalung. 2004. Hegemoni, Kekuasaan, dan Ideologi. Dalam *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia* Vol 4 No 12, 3.

[36] Ibnu Mas'ud.2016. Wacana Lintas Pemikiran Tokoh Dunia (Yogyakarta: Media Kreatif), 121.

[37] Ifitikhar Lodhi. 2021. *Globalisation and Public Polity: Bridging the Disciplinary and Epistemological Boundaries*. Dalam *Policy and Society* Vol 40 No 4, 530.

politik dengan memanfaatkan kekuasaan akan lebih dikenal masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan hilang.

Menurut Survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024, kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat naik menjadi 62,6% dibanding sebelumnya 50%.[38] Seharusnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR harus jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TNI, Polri, Presiden dan lain-lain. Mengingat, DPR adalah tempat aspirasi masyarakat untuk menuntaskan kasus-kasus yang sedang diresahkan untuk bisa diperjuangkan. Bukan membentengi isu politik yang beredar dengan isu yang tidak terlalu penting untuk dibahas secara berlarut-larut. Melansir pendapat anggota DPR RI M. Nasir Djamil perihal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk tidak menjadikan topik radikalisme sebagai isu yang berlarut-larut.

Sehingga, sangat dipotensialkan menghilangkan sejumlah isu krusial yang seharusnya diperhatikan. Menurutnya, menjadikan isu radikalisme, terlebih menujukan pada ras, agama dan komunitas tertentu, dinilai sangat kontradiktif dalam membangun kerukunan dalam kehidupan berbangsa.[39] Dalam penuturan lain, Hassan Haekal juga menilai, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa turun ketika kasus pengalihan isu tidak segera diselesaikan. Menurutnya, Viralnya Mama Ghufron memang sengaja diupload oknum di berbagai media sosial untuk menutupi kasus perpolitikan negara, terlebih menjelang pemilu 2024. Fenomena ini sama dengan viralnya kasus al-Zaytun tempo lalu.[40]

Fenomena ini juga turut menjadi tugas Majlis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera diselesaikan, karena kepercayaan masyarakat semakin turun tatkala kasus ini masih bertebaran di media sosial. Oleh karenanya, Wakil Presiden Indonesia KH. Ma'ruf Amin mengatakan, MUI harus konsisten menegakkan prinsip dan garis organisasi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dengan bertujuan, nama baik pemerintah dan MUI akan terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap keduanya tidak hilang.[41] Menilik hal di atas, senyatanya al-Qur'an telah membahas perihal anjuran bagi seorang pemimpin untuk menjaga wibawanya dan tidak menghilangkan kepercayaan rakyat yang telah diberikan.

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۙ ﴿٢٠﴾ (الرّعد/13: 20)

(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak membatalkan perjanjian (QS. Ar-Ra'd/13: 20).

Dalam penuturan al-Sawy, maksud menjaga perjanjian adalah wajib bagi orang yang telah mengatasnamakan komitmennya atas nama Allah, yaitu menepati janjinya dengan tidak melaanggar apa yang dijanjikan dan meninggalkan hal yang fardhu baginya.[42] Bahkan, dalam penjelasan al-Baidhawy, makna *"mîtsâq"* bukan hanya janji

[38] DPR RI. Presepsi Positif Masyarakat terhadap DPR Diharapkan Mampu berikan Nilai Positif pada Rakyat. Dalam *dpr.go.id* (Diakses 29 Juli 2024).

[39] DPR RI. Regislator Minta Kasus Radikalisme tak dijadikan Pengalihan Isu. Dalam *dpr.go.id* (Diakses 29 Juli 2024).

[40] Kompasiana. Haikal Hasan: Ada Oknum yang Sengaja Memviralkan Video Ghufron sebagai Pengalihan Isu. Dalam *kompasiana.com* (Diakses 29 Juli 2024).

[41] Wapresri.Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Pemerintah, MUI Haraus Konsisten. Dalam *wapresri.go.id* (Diakses 29 Juli 2024).

[42] Mahmud al-Syafrowi. 2014. Tafsir Al-Qur'an Perkata. (Mutiara Media: Yogyakarta), 151.

pada Allah semata, melainkan turut pada manusia. Oleh karenanya, melaksanakan komitmen yang telah diucapkan, baik pada Allah atau sesama manusia, harus dijalankan.[43] Terlebih Muhammad Abdul Aziz Al-Khauli dalam kitabnya *Adabunnabawy* memaparkan, termasuk *ulul amri* ialah orang yang mendapatkan amanat untuk mengatur urusan rakyat dan menjaga kemaslahatan mereka. Al-Khauli melanjutkan, ruang maslahat yang dikehendaki, jika tidak bertentangan dengan perintah Allah dan rasul-Nya. Apabila bertentangan dengan keduanya, maka tidak bisa terkategorikan sebagai maslahat dan tidak boleh untuk ditaati.[44]

Ayat di atas menjelaskan, bahwasanya sangat penting menjaga kejujuran, integritas, tanggung jawab dan amanah yang sudah diberikan. Dalam berpolitik, kekuasaan ialah sebuah amanah dan wajib untuk dijaga. Bukan sekedar jabatan yang dapat menjadikan seorang populer kemudian hidup berfoya-foya. Maknanya, demi menjaga kepercayaan rakyat, maka sangat perlu menerapkan kejujuran dan integritas yan baik. Termasuk diantaranya ialah: 1) tidak membesarkan isu di luar politik yang sifatnya tidak urgen; 2) memberikan informasi tentang perpolitikan di Indonesia sesuatu dengan fakta dan tidak menutup-nutupinya; 3) tidak menjadikan kekuasaan politik sebagai kendaraan mencari keuntungan, tapi menjadikan politik sebagai amanah yang dititipkan tuhan untuk dikelola dengan baik. Dengan demikian, nilai-nilai keluhuran dalam melaksanakan politik terlaksana secara sistematik dan jujur, hingga unsur kecurangan tidak akan ada.

KESIMPULAN

Penempatan pengalihan isu sebagai fenomena kekuasaan politik terbukti menjadi salah satu topik hangat yang harus dibicarakan. Hadirnya pengalihan isu bisa dipastikan selalu bertepatan dengan agenda perpolitikan pemerintah, seperti saat menjelang pilpres 2024, naiknya UKT, TAPERA, biaya listrik, dan melejitnya kasus dugaan korupsi 271 Triliun. Bukan hanya demikian, menjelang pilkada 2024 pun, justru kasus semacam Vina sebelum 7 hari dan Mama Ghufron belum reda hingga memancing masyarakat untuk menyoroti kasus tersebut dan melupakan kasus politik nasional. Walaupun sebagian orang mengatakan, bahwa kemunculan kasus-kasus yang menjadi topik pengalihan isu pemerintahan hanya spekulasi dan belum diketahui kebenarannya, tapi hal tersebut dipatahkan dengan fakta-fakta yang terjadi.

Sehingga, masyarakat seakan-akan dibawa pada *breakdownzones* yaitu zona-zona kesesatan dengan ditampilkannya berita media yang tidak bersifat krusial sampai menyebabkan turbulensi sosial di tengah-tengah masyarakat. Semacam kegaduhan publik di dunia maya maupun nyata, hilangnya fokus masyarakat pada isu pemerintahan dan citra media. Sehingga, ilusi opini menutupi fakta tercipta dan mengakibatkan vandalisme virtual -kerusakan dan kebobrokan media- pada aspek perpolitik karena kekuasaan yang tidak sehat. Dengan demikian, dinasti politik yang dimainkan oleh banyak oknum pemerintahan akan terealisasikan melalui pemanfaatan media publik dan jika publik tahu akan hal tersebut, maka kepercayaan masyarakat atas pemerintah serta media bisa hilang. Terlebih, apabila "pengalihan isu" tidak segera di

[43] Imam Nashiruddin Abi Said Abdillah Bin Umar Al-Baidhowy. 2019. *Tafsir al-Baidhowy* Juz 2 (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiah), 223.

[44] Muhammad Abdul Aziz al-Khuly. 2012. *Al-Adab an-Nabawy* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah), 60.

perjernih dan ditindak oleh yang berwenang, maka akan bisa menimbulkan masalah baru yang disebut *The issue Politic Alpha via Artificial Intelligent* (AI).

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin, Mayong Tetra. 2017. Kreativitas Bimbingan Media dan Konseling untuk Mengatasi Perilaku Vandalisme. Dalam *Jurnal Prosiding SNBK* Vol 1 No 1.

Amirullah. Tiga Pemilik Media massa di Barisan Pendukung Jokowi. *Tempo.com* (Diakses 26 Juli 2024).

Ardianto, Robi. Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus politik uang, 197 dari Masyarakat. Dalam *Bawaslu.go.id* (Diakses 27 Juli 2024).

Ayudiana, Shofi. "Tapera, Antara Niat Baik dan Beban". Dalam *antaranews.com* (Diakses 21 Juli 2024).

Bachtiar, Andi Touna dkk. 2016. Peran Media dalam Propaganda. Dalam *Jurnal Komunikologi* Vol 13 No 2.

Baidhowy (al), Nashiruddin Abi Said Abdillah Bin Umar. 2019. *Tafsir al-Baidhowy* Juz 3 (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiah).

Buthi (al), Muhammad Said Romdon. *tt. Dhowabith al-Maslahat Fi Syariatil Islamiyyah.* (Kairo: Al-Azhar).

DPR RI. Presepsi Positif Masyarakat terhadap DPR Diharapkan Mampu berikan Nilai Positif pada Rakyat. Dalam *dpr.go.id* (Diakses 29 Juli 2024).

DPR RI. Regislator Minta Kasus Radikalisme tak dijadikan Pengalihan Isu. Dalam *dpr.go.id* (Diakses 29 Juli 2024).

Fikriansyah, Ilham. Mengenal vandalisme Adalah: Sejarah, Penyebab dan Contohnya. Detikbali.com (Diakses 26 Juli 2024).

Hasan (al), Adli. Tekor Negara 271 Triliun Akibat Korupsi Timah, Berikut Rincian Kerugian Negara, Linkungan, hingga Ekonomi. Dalam *tempo.com* (Diakses 29 Juli 2024).

Hazri, Baiq Marcelina Geovani, Adelina Putri Yasmin, Dwiki Elyran Adha, dan Erwan Efendi. 2024. New Media: analisis Kritik Netizen terhadap kampanye Politik Identitas Ganjar Pranowo Melalui Azan Stasiun TV pada Media Sosial Tiktok. Dalam *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 4 No 3.

Hasan, Abdul Kholiq. 2013. Al-Qur'an Andalusia (Tiga Serangkai: Solo), 1024.

Hutagalung, Danial. 2004. Hegemoni, Kekuasaan, dan Ideologi. Dalam *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia* Vol 4 No 12.

Juanda, Heri. 2017. Media Sosial sebagai Penyebarluasan Informasi Pemerintah Aceh. Dalam *Jurnal Peurawi Media Kajian Komunikasi Islam* Vol 1, No 2.

Junaidi. Respons Polemik Mama Ghufron: MUI Lakukan Kajian, Termasuk Video Call dengan Malaikat maut. Dalam *mui.or.id* (Diakses 29 Juli 2024).

Kompasiana. Haikal Hasan: Ada Oknum yang Sengaja Memviralkan Video Ghufron sebagai Pengalihan Isu. Dalam *kompasiana.com* (Diakses 29 Juli 2024).

L.A. Ajoa. 2018. *An-Anti Theft Oil Pipeline Vandalism Detection: Embedded Sytem Development*. Dalam *International Journal of Engineering Science and Application* Vol 2 No 2.

Lodhi, Ifitikhar. 2021. *Globalisation and Public Polity: Bridging the Disciplinary and Epistemological Boundaries*. Dalam *Policy and Society* Vol 40 No 4.

Lumanau, Novy. "Presiden Akui Adanya Media yang Pro dan Kontra Terhadap Pemerintah". *Beritasatu.com* (26 Juli 2024).

Mas'ud, Ibnu .2016. Wacana Lintas Pemikiran Tokoh Dunia (Yogyakarta: Media Kreatif).

Muhammad Abdul Aziz al-Khuly. 2012. *Al-Adab an-Nabawy* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah).

Muhtar. Ini 7 Media Sosial Paling digunakan di Indonesia. dalam *goodstats.id* (Diakses 29 Juli 2024).

Panggabean, Ilham Budiman dan Aprilinda Martinondang Harahap. 2024. Persfektif Islam tentang Dinasti Politik. Dalam Jurnal Ilmu Agama Vol 7 No 2.

Pilliang, Yasraf Amir. 2004. Realitas Kebudayaan dalam era Post Metafisika. (Yogyakarta:Jalasutra).

Prabowo, Ronald Seger. Bersihkan Vandalisme Kritikan Pemerintah di Solo, Gibran: Yang Buat Silahkan Ketemu Saya. Dalam *suarasurakarya.id* (Diakses 29 Juli 2024).

Setyayadi, Arief. 5 Fakta Mama Ghufron Soal Bahasa Suryani yang Viral. Dalam *nasional.okezone.com* (Dikases 29 Juli 2024).

Shawy (al). Ahamad bin Muhammad. *tt*. *Hasyiyah al-Shawy* Juz 4 *(tt:* Haromain).

Syafrowi (al), Mahmud. 2014. Tafsir Al-Qur'an Perkata. (Mutiara Media: Yogyakarta).

Sulisalawaty. 2014. Melihat ke Belakang: Panggung Gemoy dan Dinamika Politik Masa Kini. Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Politik dan Humaniora Vol 3 No 2.

Suprapringgana, Santana dan Tajul Arifin. 2024. Vandalisme Menurut Persfektif Islam dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Dalam *Jurnal Pendidikan dan Insan Humaniora* Vol 2 No 3.

Wana, Kevi Laras. Mama Ghufron merasa ngak Takut kalau dilaporkan dan dianggap Menyesatkan, MUI akan Duduk Bersama untuk. Dalam *tvonenews.com* (Diakses 29 Juli 2024).

Wapresri.Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Pemerintah, MUI Haraus Konsisten. Dalam *wapresri.go.id* (Diakses 29 Juli 2024).

Wilcox, David R. 2005. *The Theory of Propaganda, In Propaganda, The Press and confilct* (sage Publications: London).